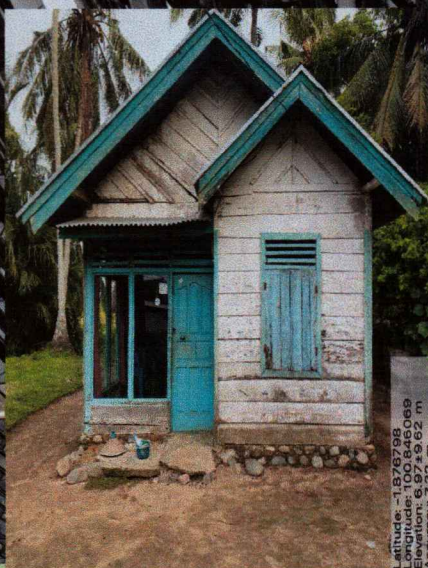


**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



Latitude: -1.876798
Longitude: 102.244332
Elevation: 9.9749162 m
Accuracy: 3.52 m
Timestamp: 2022-11-11 17:44:39
Note: Mandiri
Utm Zone: UTM
Datum: WGS 84
Projection: UTM
Units: Meter
Scale: 1:1
Datum: WGS 84
Projection: UTM
Units: Meter
Scale: 1:1
Datum: WGS 84
Projection: UTM
Units: Meter
Scale: 1:1



2022



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

PAINAN 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan.

Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Painan, Februari 2023

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640129 199309 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
1.6 Isu – isu Strategis	13
1.7 Sistematika Penulisan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
2.3 Indikator Kinerja Utama	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	20
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3 Analisis dan Capaian Kinerja.....	21
3.4 Akuntabilitas Keuangan	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Rekapitulasi Beberapa Sasaran yang mencapai target dan yang tidak mencapai target.....	53
4.2 Saran dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Kemudian LKjIP merupakan evaluasi dan laporan dari hasil pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seperti yang sudah diatur dengan Peraturan Bupati pesisir selatan No. 140 tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup dalam urusan Perumahan Rakyat, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2022. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah di capai selama tahun 2022.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengatutnya antaralain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Perangkat Daerah urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan hidup adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

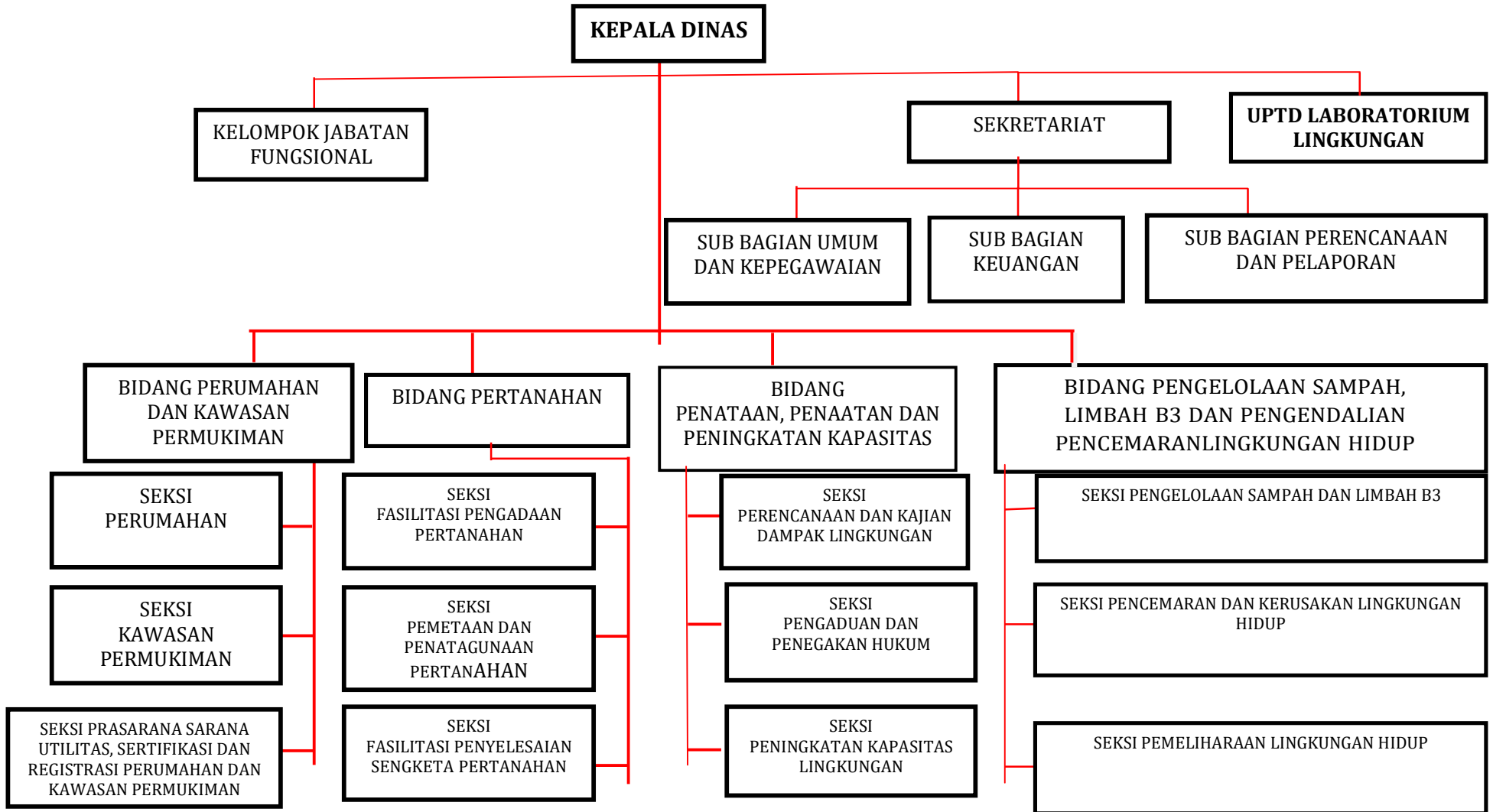
a. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Kawasan Permukiman; dan
 - 3) Seksi Prasarana Sarana Utilitas, Sertifikasi, Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d) Bidang Pertanian, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 - 1) Seksi Fasilitasi Pengadaan Pertanian;
 - 2) Seksi Pemetaan dan Penatagunaan Pertanian; dan
 - 3) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanian.
- e) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- g) UPTD; dan
- h) Jabatan Fungsional.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan meliputi:

- a) Melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.
- b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan jabatan fungsional umum.
- c) pelaksanaan pengelolaan barang/kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d) pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan serta lingkungan hidup;
- e) pelaksanaan perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlindungan dan pemanfaatan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
- f) pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g) pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas pada Dinas;
- h) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup Dinas;
- i) pelaksanaan administrasi Dinas urusan perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 47 orang PNS dan 42 Tenaga Honorer, secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris Dinas. 4 Kepala Bidang dan 17 Kasubag/ Kasi. Berdasarkan Tingkatan pendidikan nya pegawai Dinas Perumahan Kawasan permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel dibawah

Table 1
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS/Honorer
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Golongan IV/c	1	-	1
2	Golongan IV/b	1	-	1
3	Golongan IV/a	2	-	2
	Sub Jumlah	4	-	4
4	Golongan III/d	6	5	11
5	Golongan III/c	2	2	4
6	Golongan III/b	1	3	4
7	Golongan III/a	7	8	15
	Sub Jumlah	16	18	34
8	Golongan II/d	3	1	4
9	Golongan II/c	1	4	5
10	Golongan II/b	-	-	-
11	Golongan II/a	-	-	-
	Sub Jumlah	4	5	9
12	Honorer	21	21	42
	TOTAL	45	44	89

Tabel 2

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Pegawai				Jumlah	Persentase (%)
	PNS Daerah	PNS Pusat	CPNS	Honorer		
S2	11	-	-	1	12	13.48
S1	24	-	1	15	40	44.94
D. III	2	-	1	9	12	13.48
SMA	8	-	-	17	25	28.08
SMP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
TOTAL	45	-	2	42	89	100

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain diklat Amdal, diklat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), diklat Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Geologi Lingkungan untuk Penentuan TPA Sampah, Manajemen Mutu Laboratorium, Teknik Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengendalian Dampak Pencemaran B3, Pengendalian Pencemaran Terpadu, Inspeksi dan Sampling, Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Sistem Pengelolaan TPA Sampah, Manajemen Operasional Persampahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sarana Prasarana

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan .

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup didukung oleh :

Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Sarana Prasarana	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat – alat Angkutan (Mobil Dinas)	5 unit
2	Kendaraan Roda Dua	17 unit
B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Kantor	2 unit
2	Bangunan Ruang Pelayanan	1 unit
3	Bangunan Gudang	4 unit
4	Bangunan Mushalla dan Tempat Wudhu	1 unit
5	Bangunan UPT Laboratorium LH	1 unit

Pada tahun 2008 di resmikan laboratorium untuk melaksanakan standar pelayanan minimal lingkungan hidup, labor ini memiliki peralatan untuk pemeriksaan kualitas air dan Udara seperti: suhu, Ph (derajat keasaman) dan DO(oksigen terlarut). Keterbatasan alat mengakibatkan sedikitnya parameter kualitas air dan udara yang dapat diukur. Pengoperasional labor ini telah dirumuskan pada tahun 2009.

Kondisi saat ini peralatan yang dimiliki laboratorium Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup masih banyak keterbatasan sesuai dengan standar Laboratorium Lingkungan Hidup (seperti dalam tabel berikut) :

Inventarisasi Peralatan Laboratorium Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab.Pesisir Selatan

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
1	Global Positioning Aystem (Garmin)	1	Baik	Digunakan	2006	DAK
2	Spektroquannova Merck	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
3	DO Meter (YSI)	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
4	Conductivity Meter (Mirron)	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
5	Current Meter	1	Baik	Digunakan	2006	DAK
6	PH Meter (Orrion)	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
7	Portable Turbidimeter	1	Rusak	Tidak	2006	DAK
8	Timbangan	1	Rusak	Tidak	2007	DAK
9	Centrifuge	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
10	Refrigerator/Freezer	1	Rusak	Tidak	2007	DAK
11	Mikroskop Binokuler	1	Baik	Tidak	2007	DAK
12	Perangkat Titrasi	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
13	Desikator	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
14	Salino Meter	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
15	Water sample	1	Rusak	Tidak	2007	DAK
16	Oven	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
17	Hotplate	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
18	Lemari Asam	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
19	Mobil workshop	1	Baik	Digunakan	2007	DAK
20	Penangas Air	1	Baik	Tidak	2007	DAK
21	Autocly	1	Baik	Digunakan	2008	DAK
22	Stopwatch (CasioHS3-1)	1	Baik	Digunakan	2009	DAK
23	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	1	Rusak	Tidak	2009	DAK
24	DO Meter (Eutech)	1	Rusak	Tidak	2009	DAK
25	Anemometer	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
26	Extraction Heater	1	Rusak	Tidak	2011	DAK
27	Soun Level Meter Tester	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
28	GPS (Global Positioning system)	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
29	Spektrofotometer UV-Vis PG Instrument	1	Baik	Digunakan	2011	DAK
30	COD Reaktor (HANNA/ HI 839800-02)	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
31	Pompa Vacuum	1	Baik	Digunakan	2013	DAK
32	Desikator Auto Dry	1	Baik	Digunakan	2013	DAK
33	Filter dan Holder	1	Baik	Digunakan	2013	DAK

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
34	PH Elektroda	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
35	Turbidity Meter	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
36	Water Sampler	1	Baik	Digunakan	2013	DAK
37	DO Meter (HI 9146/ HANNA)	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
38	PH Meter (D54 E HO RIDA)	1	Rusak	Tidak	2013	DAK
39	Klem Buret Double	1	Baik	Digunakan	2015	DAK
40	Alat Destilasi	1	Baik	Tidak	2015	DAK
41	Alat Pengukur Emisi Kendaraan	1	Baik	Tidak	2015	DAK
42	Neraca analitik (Fujisu/FS- AR 210)	1	Baik	Digunakan	2015	DAK
43	Oven(Memmert/Uf-76)	1	Baik	Digunakan	2015	DAK
44	pH meter	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
44	Conductivity	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
45	Magnetic Stirer	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
46	Dispensmate Plus 0.5 -5 ml	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
47	Dispensmate Plis 1- 10 ml	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
48	Pippet Filler Levo me	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
49	Pippet Filler Levo me	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
50	Cool Box	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
51	Trolley Instrumen 2 Rak	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
52	Tabung Aerasi 10 Liter	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
53	BOD incubator	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
54	Oven (Un 55)	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
55	Analytical Balance	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
56	Rak tabung reaksi	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
56	Scrubber	1	Baik	Digunakan	2020	APBD
56	Rak tabung reaksi	1	Baik	Digunakan	2019	APBD
56	Fume Scrubber	1	Baik	Digunakan	2020	APBD
57	Safety Shower	1	Baik	Digunakan	2021	APBD
58	Gelas Piala 50 ml	5	Baik	Digunakan	2022	APBD
59	Labu Ukur 50 ml	8	Baik	Digunakan	2022	APBD
60	Labu Ukur 100 ml	15	Baik	Digunakan	2022	APBD
61	Labu Ukur 250 ml	5	Baik	Digunakan	2022	APBD
62	Labu Ukur 500 ml	4	Baik	Digunakan	2022	APBD
63	Pipet volumetrik 10 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
64	Pipet Volumetrik 100 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
65	Pipet Volumetrik 1 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD

No	Nama alat	Jumlah	Kondisi saat ini	Penggunaan	Tahun pengadaan	Sumber Dana
66	Pipet Volumetrik 25 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
67	Pipet Volumetrik 2 ml	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
68	Pipet Volumetrik 4 ml	4	Baik	Digunakan	2022	APBD
69	Wide Mouth Bottle PE 500 ml	5	Baik	Digunakan	2022	APBD
70	Decikator Auto Dry Horizontal	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
71	Pipette Filler Levo Plus	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
72	Dispenmate Plus dispenser 2.5 25 ml	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
73	Rack for Sep. Funnel For 2 L	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
74	Spatula Double Spoon 120 mm	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
75	Micro Spatula Spoon dia 185 mm	2	Baik	Digunakan	2022	APBD
76	Test Tube Rack dia 21 mm, 21x50	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
77	Pipette Support Rack PP, W=213 mm	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
78	Atomic Absorption Spectrophotometer Unit (AAS)	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
79	Rotary Evaporator	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
80	COD Reaktor	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
81	pH Meter Benctop	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
82	Oven	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
83	Buret Teflon Bening 10 ml	3	Baik	Digunakan	2022	APBD
84	Buret Teflon Coklat 10 ml	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
85	Erlenmeyer Flask 100 ml	15	Baik	Digunakan	2022	APBD
86	Burette Teflon Stopcock Clear Amber Grduation Class A 10 ml	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
87	Erlenmeyer Flask 250 ml	40	Baik	Digunakan	2022	APBD
88	Test Tube w/o Screwv cap, Clear, OD 20 X 125 mm	50	Baik	Digunakan	2022	APBD
89	Screw Cap Teflon Liner For Test Tube no.18	50.	Baik	Digunakan	2022	APBD
90	Incubator 53 Liter	1	Baik	Digunakan	2022	APBD
91	Precision Balance 0.01 gr	1	Baik	Digunakan	2022	APBD

1.6 ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat

dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta pengembangan Perumahan Rakyat dan Permukiman. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

A. Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup

1. Belum maksimalnya sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan.

Belum adanya pejabat yang berkompentensi khusus dalam bidang pengawasan lingkungan hidup (PPLHD) dan masih rendahnya kesadaran pemilik usaha dalam mengurus izin lingkungan serta melakukan dan menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan setelah dikeluarkannya persetujuan lingkungan.

2. Belum maksimalnya sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan sampah, sehingga apabila tidak tertangani dengan baik dan optimal akan memberikan dampak terhadap lingkungan dan masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah sehingga sampah menjadi lebih banyak.

B. Isu-isu Strategis Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Rendahnya tingkat penghunian rumah layak dan sehat

Belum optimalnya akses permukiman layak huni disebabkan :

1. Rendahnya ketersediaan rumah layak huni
2. Belum terpenuhi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
3. Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
4. Masih rendahnya realisasi penanganan Kawasan Permukiman kumuh
5. Masih ada beberapa Kawasan Permukiman yang berada dalam Kawasan Hutan

2. Belum maksimalnya birokrasi memberi pelayanan secara transparan dan akuntabel

Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran

1. Masih tingginya intensitas konflik dan sengketa pertanahan
2. Masih banyaknya tanah yang belum terdaftar
3. Masih banyaknya tanah yang dimiliki secara komunal yang diatur secara adat

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2022.

BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2022, serta Foto Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam penyusunan Renstra ini harus mengacu kepada visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021–2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026. Adapun visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi menjadi alasan utama mengapa organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja oleh segenap stakeholder pembangunan. Berdasarkan Visi diatas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

- I. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;*
- II. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;*
- III. Memperkuat kemadirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah;*
- IV. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan*
- V. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;*
- VI. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis;*

Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

adalah Misi ke 2 yaitu Meningkatkan Kualitas hidup manusia dan masyarakat, Misi ke 6 yaitu Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis untuk urusan bidang perumahan dan permukiman, Misi ke 1 yaitu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Demokratis dan Transparan untuk urusan bidang pertanahan dan Misi ke 3 yaitu Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah untuk urusan Lingkungan Hidup

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman layak huni	Rasio Permukiman layak Huni	96.8363
2	Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.8
		IKA,IKU,IKL	IKA (55.3), IKU (84.3), IKL (63.4)
3	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase luas Lahan yang Bersifikat	68.554%
		Inovasi Perkimtan LH (SIMANTAN)	1
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perkimtan LH	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan LH	BB

Program dan Anggaran yang mendukung pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan Perumahan	535,179,470
2	Kawasan Permukiman	199,999,815
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5,108,299,000
4	Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2,238,760,420
5	Penyelesaian Sengketa tanah Garapan	61,559,080
6	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	41,997,990
7	Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	45,667,464
8	Penetapan tanah Ulayat	53,159,000
9	Pengelolaan Tanah Kosong	56,236,530
10	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	1,585,100
11	Penatagunaan Tanah	89,787,990
12	Perencanaan Lingkungan Hidup	15,0000,000
13	Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	2,288,776,934
14	Pengelolaan Keaneragaman Hayati	1,819,682,552
15	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	14,299,970
16	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	149,921,940
17	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	128,888,490
18	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	37,614,930
19	Pengelolaan Persampahan	7,798,838,536

2.3. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022 ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 yang merupakan bentuk Komitmen antara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas Program-Program Kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2022 berisi tentang Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target pada tahun anggaran bersangkutan. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Penjelasan Formula Perhitungan	Target						Sumber Data
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak huni	Rasio Permukiman layak Huni	Luas Permukiman Layak huni/Luas Wilayah permukiman	96.8229	96.8363	96.8497	96.8631	96.8765	96.8900	Dinas Perkimtan LH
2	Meningkatnya Tata Kelola pertanahan	Persentase Luas Lahan Yang yang Bersertifikat	Luas Lahan Yang Bersertifikat/ Luas Wilayah	64.590 %	68.554 %	72.766 %	76.978 %	81.437 %	85.897 %	Dinas Perkimtan LH
3	Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	$(0.376 * IKA) + (0.405 * IKU) + (0.219 * IKL)$	86.74	68.8	69.1	69.5	69.7	70	Dinas Perkimtan LH
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perkimtan LH	Laporan Hasil Penilaian (LHE) Terhadap LKJiP	Hasil Evaluasi Inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	Dinas Perkimtan LH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel dibawah ini :

- a. Capaian kinerja >85% sampai dengan 100% = Sangat Baik;
- b. Capaian kinerja >69% sampai dengan 84% = Baik;
- c. Capaian kinerja >53% sampai dengan 68% = Cukup ;
- d. Capaian kinerja <53% = Gagal.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisi realisasi dan persentase capaian indikator kinerja seperti pada tampilan tabel berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak huni	Rasio Permukiman layak Huni	-	96,8363	96,9187	100.085
2	Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	68.8	77.94	113.28
		Indeks Kualitas Air	-	55.3	66.83	120.85
		Indeks Kualitas Udara	-	84.3	92.43	109.64
		Indeks Kualitas Tutupan lahan	-	63.4	70.21	110.74
3	Meningkatnya Tata Kelola pertanahan	Persentase Luas lahan yang Bersertifikat	%	68.554	66.4527	96.480
Rata Rata						101.381

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana uraian diatas bahwa pada tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup melaksanakan 3 (Tiga) urusan yaitu Lingkungan Hidup, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan, dengan 20 Program, 31 Kegiatan, 51 sub kegiatan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak huni

Program yang mendukung sasaran 1 yaitu Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Rasio Permukiman layak Huni = Luas Permukiman Layak Huni/Luas Wilayah Permukiman x 100% = (14,447.68/14,907) x 100 % = 96.9187

No	Indikator Kinerja	Capaian		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		Target	Realisasi				
1	Rasio Permukiman Layak Huni Formula : <i>Luas Permukiman Layak Huni/Luas Wilayah permukiman</i>	96,8363	96,9187	Program kawasan Permukiman	199.999.815	190.954.665	95.48

Indikator kinerja Rasio Permukiman layak huni capaian kinerja melebihi dari target tahun 2022, target kinerja 96,8363 % sedangkan capaian kinerja tahun 2022 adalah 96.9187 dengan persentase tingkat capaian 100.085 %.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio Permukiman Layak Huni 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1.1 Rasio Permukiman Layak Huni	%	96.8095	96.8095	96.9187

Berdasarkan tabel diatas apabila dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, capaian Rasio Permukiman Layak Huni di Tahun 2022 mengalami peningkatan karena ada Dana APBN dan APBD Provinsi. Sedangkan di Tahun 2021 dan 2022 tidak alokasi anggaran untuk pelaksanaan penanganan Kawasan Kumuh

Pencapaian Kinerja untuk Rasio Permukiman Layak huni di dukung oleh Dana APBN dengan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang berlokasi di Kawasan Kumuh Batang Betung Tapan dengan luas kawasan Kumuh 17, 93 Ha. Penanganan Tahun 2022 seluas 8,85 Ha. Indikator Kumuh yang dikerjakan adalah penanggana jalan dan drainase.



Kawasan Kumuh Batang Betung Tapan

Penanganan Kawasan Kumuh Surantih Kewenangan Provinsi dikerjakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dengan luas kawasan Kumuh 13, 72 Ha, penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2022 adalah 5,44 Ha. Sehingga dengan bantuan Pusat dan Provinsi target pencapaian Kinerja penanganan Kawasan Kumuh bisa memenuhi target capaian tahun 2022. Indikator Kumh yang dikerjakan adalah penanganan Drainase.



Kawasan Kumuh Surantih

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Media Lingkungan

Program yang mendukung sasaran 2 adalah Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati, Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan, Program Perencanaan Lingkungan hidup, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Saat ini upaya mengendalikan Pencemaran dan kerusakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Komponen masyarakat masih belum dapat meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di kabupaten Pesisir Selatan, berbagai inisiatif dilakukan dan ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan, hal yang menjadi krusial adalah penentuan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementasi dari upaya yang dilakukan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada Tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah di pahami dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup (IKLH) indek ini terfokus pada media lingkungan air. Udara dan lahan, IKLH adalah perwujudan parameter Lingkungan Hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna esensi dari masing-masing indikator pada setiap Lingkungan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 IKLH didapatkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Untuk IKLH Kabupaten/Kota } (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

a. Perhitungan Pencapaian IKLH Tahun 2022.

$$\begin{aligned} \text{IKLH diperoleh} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= (0,376 \times 66,83) + (0,405 \times 92,43) + (0,219 \times 70,21) \\ &= 25,13 + 37,43 + 15,36 \end{aligned}$$

$$\text{IKLH} = 77,94 \text{ (baik)}$$

- Keterangan
1. IKU = Indek Kualitas Udara
 2. IKL = Indek Kualitas Lahan
 3. IKA = Indek Kualitas Air

Status IKLH Kab. Pesisir Selatan pada angka 77,94 menunjukkan Lingkunganyang baik.

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Terjaminnya kelestarian lingkungan	1.1 Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	68.80	77.94	113.28	

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	OPD
Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	396,646,545	360,948,796	91.00	Dinas Perkimtan LH

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.1	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	86.74	75.8	77.94

Analisis hasil capaian kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan IKLH karena ada perubahan formula dan target kinerja yang diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat edaran No. SE.4/MenLHK/Setjen/KUM.14/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Berwawasan Lingkungan. Kemudian Perbandingan capaian 2021 ke Tahun 2022 mengalami peningkatan dengan hasil IKLH Baik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota Lain Capaian Kinerja Dinas Perkimtan LH berada di posisi 2 terbaik di Sumatera Barat dengan posisi 1 adalah Kabupaten Pasaman dengan Capaian IKLH 78.07. Berikut dapat dilihat hasil capaian Kinerja Kabupaten Kota ses Sumatera Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Agam	Sumatera Barat	61.28	90.94	48.01	70.39	67.8	BAIK
2	Kabupaten Dharmas Raya	Sumatera Barat	51.38	85.32	42.7	63.23	64.93	SEDANG
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Sumatera Barat	0	92.68	93.21	57.95	79.51	SEDANG
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat	55.63	92	62.53	71.87	71.02	BAIK
5	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat	53.81	93.89	39.76	66.97	67.89	SEDANG
6	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat	62.38	93.44	76.56	78.07	74.64	BAIK
7	Kabupaten Pasaman Barat	Sumatera Barat	61.25	94.36	46.81	71.5	68.74	BAIK
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Sumatera Barat	66.83	92.43	70.21	77.94	72.45	BAIK
9	Kabupaten Sijunjung	Sumatera	57.64	94.51	65.58	74.31	70.79	BAIK

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
10	Kabupaten Solok	Sumatera Barat	54.17	90.55	72.96	73.02	69.28	BAIK
11	Kabupaten Solok Selatan	Sumatera Barat	56.67	91.9	75.07	74.97	79.74	BAIK
12	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat	57.39	91.06	52.26	69.9	68.01	SEDANG
13	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	30	87.89	22.38	51.77	56.8	SEDANG
14	Kota Padang	Sumatera Barat	66.67	73.87	72.34	70.83	66.84	BAIK
15	Kota Padang Panjang	Sumatera Barat	46.07	91.29	56.18	66.6	72.64	SEDANG
16	Kota Pariaman	Sumatera Barat	33.33	95.09	24.24	56.35	63.6	SEDANG
17	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	55.14	93.11	25.78	64.09	58.75	SEDANG
18	Kota Sawah Lunto	Sumatera Barat	52	87	37.01	62.89	65.7	SEDANG
19	Kota Solok	Sumatera Barat	50.83	91.07	38.3	64.38	69.6	SEDANG

Analisis Program Penunjang Sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		Target	Realisasi				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Formula : $(0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	72.45	77.94	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2,288,776,934	2,208,805,260	96.51
				Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	1,819,682,552	1,799,130,760	98.87
				Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)	14,299,970	14,158,070	99.01
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	149,921,940	140,473,146	93.70
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	128,888,490	90,340,790	70.09
				Program Penanganan Lingkungan Hidup	37,614,930	34,776,760	92.45
				Program Pengelolaan Persampahan	7,798,838,536	7,731,609,996	99.14
				Program Perencanaan Lingkungan hidup	150,000,000	94,572,040	63.05

JUMLAH	12.388.023.352	12.113.866.822	97.79
--------	----------------	----------------	-------

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa capaian kinerja sudah tercapai melebihi target dengan capaian 107,58 %. Dari sisi capaian Anggaran dari alokasi anggaran Rp. 12.388.023.352, terealisasi Rp. 12.113.866.822 dengan tingkat capaian 97.79. Dapat disimpulkan untuk target kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terdapat efisiensi Anggaran sebesar Rp. 274.156.530

Parameter yang di uji pada IKA ini adalah untuk parameter fisika pH, TSS, dan TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD dan Fosfat . Pemantauan Kualitas Air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 x 6 bulan di Musim Hujan dan Musim Kemarau. Pada peraturan Menteri Negara lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 Pasal 31 bahwa pemantauan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menentukan status mutu dari air sungai yang merupakan dasar untuk evaluasi terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Parameter yang diukur Dinas Lingkungan Hidup Pada Tahun 2022 antara lain : DO,BOD,COD, TSS. Fosfat, Caliform E.Coli dan Pemantauan dilakukan 2x dalam setahun dibagian hulu dan hilir sungai di 8 Sungai Kabupaten Pesisir Selatan.



Pengambilan Sampel uji Indeks Kualitas Air



Pengujian Sampel Indeks Kualitas Air

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup juga didukung dengan Indikator (2) Indeks Kualitas Udara dan (3) Indeks Kualitas Lahan. Kedua indeks ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Program Kegiatan yang mendukung Pencapaian sasaran strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan) adalah: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati. Program Pengelolaan Persampahan di berlakukan di seluruh pelosok kabupaten dengan membersihkan sampah dan mengumpulkan sampah serta mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Program Keanekaragaman Hayati dengan memelihara, merawat dan menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hutan Kota	RTH Hutan Kota Bukit Langkisau	166	Salido	IV Jurai	- 1.3440527 77777770	100.571841 6666660
2	Taman Kota	RTH Taman Kota Kawasan Stadion H. Ilyas Yacub	2.5045	Painan	IV Jurai	- 1.3419722 22222220	100.586149 9999990
3	Taman Kota	RTH Taman Spora	1.346	Painan	IV Jurai	- 1.3448444 44444440	100.578822 2222220

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
4	Taman Kota	RTH Taman Kota Kawasan Shelter Rawang	0.46	Painan	IV Jurai	- 1.3421472 22222220	100.586774 9999990
5	Taman Kota	RTH Taman Kota Kawasan Islamic center	1.26	Salido	IV Jurai	- 1.3057583 33333330	100.541836 1111110
6	Taman Kota	RTH Taman Pantai Carocok	12.023	Painan	IV Jurai	- 1.3522944 44444440	100.564852 7777770
7	Taman Kota	RTH Taman Kawasan GOR Zaini zein	2.3023	Painan	IV Jurai	- 1.3575833 33333330	100.576011 1111110
8	Taman Rekreasi	RTH Taman Rest Area Batas Kota	0.1	Siguntur	Koto XI Tarusan	- 1.0692472 22222220	100.430086 1111110
9	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor Dinas PERKIMTA NLH	0.2046	Painan	IV Jurai	- 1,339,932, 052,692,22 0	10,058,688, 190,318,70 0
10	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor UPTD KPHP PESSEL	0.1445	Painan	IV Jurai	- 13,402,805 ,774,055,1 00	10,058,580, 881,159,00 0
11	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor Bupati PESSEL	0.2715	Painan	IV Jurai	- 13,477,735 ,144,669,3 00	10,057,784, 081,176,30 0
12	Pekarangan	Taman Pekarangan Kantor BAPEDALI TBANG PESSEL	0.4985	Painan	IV Jurai	- 1,306,661, 875,084,44 0	10,054,555, 087,654,30 0
13	Sempadan Sungai	RTH Sungai Sutera	1160.216	Koto Nan Tigo	Sutera	- 1.5770250 00000000	100.639555 5555550
14	Sempadan Sungai	RTH Sungai Silaut	1606.8363	Silaut 6	Silaut	- 2.4343777 77777770	100.999627 7777770
15	Sempadan Sungai	RTH Sungai Ranah Pesisir	1263.0128	Padang Laban	Ranah Pesisir	- 1.7876194 44444440	100.771844 4444440

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
16	Sempadan Sungai	RTH Sungai Tapan	717.0095	Talang Balarik	Ranah Ampek Hulu Tapan	- 2.1639972 22222220	101.094072 2222220
17	Sempadan Sungai	RTH Sungai Pancung Soal	1317.6815	Inderapura	Pancung Soal	- 1.9939027 77777770	100.876408 3333330
18	Sempadan Sungai	RTH Sungai Lunang	1222.7733	Lunang	Lunang	- 2.2703333 33333330	100.879475 0000000
19	Sempadan Sungai	RTH Sungai Linggo Sari Baganti	991.9776	Air Haji	Linggo Sari Baganti	- 1.9211527 77777770	100.885680 5555550
20	Sempadan Sungai	RTH Sungai Lengayang	1306.9512	Kambang	Lengayang	- 1.6852833 33333330	100.701272 2222220
21	Sempadan Sungai	RTH Sungai Tarusan	1320.414	Batu Hampar	Koto XI Tarusan	- 1.2722750 00000000	100.466661 1111110
22	Sempadan Sungai	RTH Sungai Bayang	417.213	Pasar Baru	Bayang	- 1.3029055 55555550	100.503152 7777770
23	Sempadan Sungai	RTH Sungai IV Jurai	993.156	Tambang	IV Jurai	- 1.3373499 99999990	100.571663 8888880
24	Sempadan Sungai	RTH Sungai Bayang Utara	758.2241	Limau Gadang	Bayang Utara	- 1.2278944 44444440	100.538530 5555550
25	Sempadan Sungai	RTH Sungai Batang Kapas	1376.965	IV Koto Hilie	Batang Kapas	- 1.4804805 55555550	100.598163 8888880
26	Sempadan Sungai	RTH Sungai BAB Tapan	1169.8724	Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	- 2.1495111 11111110	101.079197 2222220
27	Sempadan Sungai	RTH Sungai Air Pura	707.4995	Inderapura Utara	Airpura	- 1.9879777 77777770	100.874702 7777770
28	Sabuk Hijau	RTH Pantai Tarusan	1256.895	Nanggalo	Koto XI Tarusan	- 115460805 27554700	100384957 51176200
29	Sabuk Hijau	RTH Pantai Bayang	61.5419	Pasar Baru	Bayang	- 1.3027777 77777770	100.498294 4444440
30	Sabuk Hijau	RTH Pantai IV Jurai	689.81	Painan	IV Jurai	- 1.3127888 88888880	100.547544 4444440

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
31	Sempadan Pantai	RTH Pantai Sago	2.45	Sago	IV Jurai	- 1.3095722 22222220	100.541233 3333330
32	Sabuk Hijau	RTH Pantai Batang Kapas	599.605	Taluk	Batang Kapas	- 1.3837916 66666660	100.587522 2222220
33	Sabuk Hijau	RTH Pantai Sutera	988.4468	Surantih	Sutera	- 1.5345305 55555550	100.623200 0000000
34	Sabuk Hijau	RTH Pantai Lengayang	1547.3023	Kambang	Lengayang	- 1.6800722 22222220	100.697994 4444440
35	Sabuk Hijau	RTH Pantai Ranah Pesisir	1752.4659	Palangai	Ranah Pesisir	- 1.7714583 33333330	100.759491 6666660
36	Sabuk Hijau	RTH Pantai Linggo Sari Baganti	1882.4014	Air Haji	Linggo Sari Baganti	- 1.8665138 88888880	100.830338 8888880
37	Sabuk Hijau	RTH Pantai Air Pura	894.1393	Lalang Panjang Inderapura	Airpura	- 1.9902277 77777770	100.870700 0000000
38	Sabuk Hijau	RTH Pantai Lunang	997.9846	Lunang	Lunang	- 2.2771361 11111110	100.878844 4444440
39	Sabuk Hijau	RTH Pantai Silaut	1512.1425	Sambungo	Silaut	- 2.4401722 22222220	100.998950 0000000
40	Media Jalan	RTH Jalan Tarusan	1546.9466	Duku	Koto XI Tarusan	- 1.0694277 77777770	100.430258 3333330
41	Media Jalan	RTH Jalan Bayang	675.7622	Pasar Baru	Bayang	- 1.2984388 88888880	100.494383 3333330
42	Media Jalan	RTH Jalan IV Jurai	1096.744	Salido	IV Jurai	- 1.3090944 44444440	100.548583 3333330
43	Media Jalan	RTH Jalan Batang Kapas	2790.1059	IV Koto Hilie	Batang Kapas	- 1.3988861 11111110	100.590711 1111110
44	Media Jalan	RTH Jalan SUTERA	2788.0544	Surantih	Sutera	- 1.5639333 33333330	100.640713 8888880
45	Media Jalan	RTH Jalan Lengayang	3068.4913	Kambang	Lengayang	- 1.6798111 11111110	100.698397 2222220
46	Media Jalan	RTH Jalan Ranah Pesisir	1985.1964	Sungai Tunu	Ranah Pesisir	- 1.7789472 22222220	100.782002 7777770
47	Media Jalan	RTH Jalan LS Baganti	2071.9677	Air Haji	Linggo Sari Baganti	- 1.8191222 22222220	100.848324 9999990

No	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa	Kecamatan	Koordinat Lintang	Koordinat Bujur
48	Media Jalan	RTH Jalan Air Pura	2338.7616	Lalang Panjang Inderapura	Airpura	- 1.9631027 77777770	100.920302 7777770
49	Media Jalan	RTH Jalan Pancung Soal	2892.3745	Inderapura	Pancung Soal	- 2.0079388 88888880	100.953550 0000000
50	Media Jalan	RTH Jalan BAB Tapan	1983.7618	Tapan	Basa Ampek Balai Tapan	- 2.1063333 33333330	101.053297 2222220
51	Media Jalan	RTH Jalan RAHUL Tapan	1211.1575	Kampung Tengah Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan	- 2.1480833 33333330	101.088872 2222220
52	Media Jalan	RTH Jalan Lunang	2687.6766	Lunang	Lunang	- 2.2139666 66666660	101.118891 6666660
53	Media Jalan	RTH Jalan Silaut	2823.0991	Silaut	Silaut	- 2.3326222 22222220	101.155275 0000000
54	Media Jalan	RTH Jalan Bayang Utara	1357.8393	Puluik-puluik	Bayang Utara	- 1.2300194 44444440	100.547291 6666660
		jumlah	60020.0407				

- (1) Jenis RTH : Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota, Sempadan Jalan, Sempadan Sungai, dll
- (2) Nama RTH : Sesuai dengan SK atau penamaan lain
- (3) Luas : Luas (Hektar)
- (4) Desa : Nama Desa
- (5) Kecamatan : Nama Kecamatan
- (6) Koodinat Lintang : Koordinat proyeksi geografis (WGS84) dalam satuan derajat desimal (untuk LS diawali dengan notasi (-))
- (7) Koodinat Bujur : Koordinat proyeksi geografis (WGS84) dalam satuan derajat desimal

Sebagai Monitoring dan Evaluasi dalam mencapai sasaran strategis diatas dilakukan Pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah diberikan rekomendasi izin Lingkungan yang diharapkan dari pengawasan ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan , sosialisasi sekaligus menindak lanjuti pengaduan yang terkait dengan masalah lingkungan, di samping itu dari hasil Monitoring ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup bisa melakukan pembinaan dan mengusulkan terkait dengan peningkatan Peringkat Perusahaan (proper) dan sosialisasi mengenai kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan program CS dan melakukan pengendalian terhadap bahan Berbahaya dan

Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3) melalui Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun(B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH dilihat dari Dokumen Lingkungan dan SPPL yang sudah mendapat persetujuan dari DinasLingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen UKL-UPL sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) dokumen terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Ruas Jalan, Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani dan lain-lain
2. Persetujuan SPPL sebanyak 10 (Sepuluh) buah yang terdiri atas usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Menara, Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) Peningkatan Jaringan Irigasi dan lain-lain.

Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota dilakukan penilaian status ketaatan Pemrakarsa/perusahaan/kegiatan yang sudah memiliki izin lingkungan ditampilkan pada tabel berikut:

Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2022.

NO	Jadwal Pengawasan	Objek Pengawasan	Lokasi	Hasil Pengawasan		Status
				UKL	UPL	
1	30 Maret 2022	PT. Kemilau Permata Sawit	Nagari Kubu Tapan dan Nagari Simpang Gunung Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Terdapat beberapa kewajiban yang Pengelolaan Lingkungan yang belum dipenuhi.	Sudah melakukan pengujian uji emisi udara, pemantauan kualitas air limbah dan air sungai serta sudah melaporkan hasil pemantauan secara berkala	Taat
2	10 Maret 2022	Puskesmas Balai Selasa	Kampung Koto nan Ampek Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir	Sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Terdapat beberapa kewajiban yang Pengelolaan Lingkungan yang belum dipenuhi.	Sudah melakukan pencatatan limbah B3 dalam logbook, melakukan pemantauan air limbah, belum melakukan pengelolaan gangguan lalu lintas	Tidak Taat

NO	Jadwal Pengawasan	Objek Pengawasan	Lokasi	Hasil Pengawasan		Status
				UKL	UPL	
4	31 Maret 2022	CV. Andalas Samudera Sejati	Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan	a. CV. Andals Samudera Sejati sudah tidak menggunakan genset sebagai sumber energi dan diganti dengan Panel Surya dan b. Menyediakan MCK yang layak dan tidak melakukan kegiatan disekitar mangrove	Sudah melakukan inventarisasi mangrove, analisi terumbu karang, dan pemantauan kualitas air laut	Taat
5	05 Agustus 2022	Pangkalan Pendaratan Ikan Carocok Tarusan	Kampung Anau Carocok Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan	Sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Sebagian besar kewajiban sudah dipenuhi	Belum melakukan pemantauan udara ambien dan pemantauan kualitas air laut	Taat
6	24 Maret 2022	Puskesmas Air Haji	Kampung Koto Panai, Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti	Sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Terdapat beberapa kewajiban yang Pengelolaan Lingkungan yang belum dipenuhi.	Belum melakukan pencatatan logbook limbah B3, belum melakukan pemantauan air limbah, dan penghijauan	Tidak Taat
7	12 Oktober 2022	PT. Citalaras Cipta Indonesia	Kampung Rawang Bubur Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Sudah memiliki Dokumen Rencana Pemulihan Gambut Tahun 2019. Sudah memenuhi tahapan proses pemulihan gambut Ditjen PPKL KLHK namun belum memiliki SK Pemulihan Ekosistem Gambut karena menunggu verifikasi laporan survey karakteristik gambut dari KLHK	Sudah membuat laporan semester I tahun 2022 namun belum menyampaikan laporan hasil pelaksanaan UKL-UPL, Pemantauan Kebakaran Hutan, dan Pengelolaan Limbah B3 ke Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan	Taat
8	17 Maret 2022	Puskesmas Kambang	Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan	Sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Terdapat beberapa kewajiban yang Pengelolaan Lingkungan yang belum dipenuhi.	Belum melakukan pemantauan udara ambien, kebisingan dan pemantauan air limbah	Tidak Taat
9	31 Maret 2022	PT. Dempo Fuyang Aquatic	Perairan Teluk Mandeh, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan	Pengawasan yang dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT. Dempo Fuyang Aquatic yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/44/p2KLPHL/DLH-2021 hasil dari pengawasan, PT. Dempo Fuyang Aquatic belum memenuhi semua substansi kewajiban yang diperintahkan		Tidak taat

NO	Jadwal Pengawasan	Objek Pengawasan	Lokasi	Hasil Pengawasan		Status
10	19 Juli 2022	PT. Dempo Fuyang Aquatic	Perairan Teluk Mandeh, Kenagarian Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kecamatan Koto XI Tarusan	Pengawasan yang dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT. Dempo Fuyang Aquatic yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/44/p2KLPHL/DLH-2021. Pengawasan ini adalah verifikasi lanjutan dari Pengawasan pada tanggal 30 Maret 2022. Hasil dari pengawasan ini, PT. Dempo Fuyang Aquatic belum memenuhi semua substansi kewajiban yang diperintahkan.		Tidak Taat
11	30 Maret 2022	PT. Dempo Maju Cemerlang	Nagari Salido Sari Bulan, Kecamatan IV Jurai	Pengawasan yang dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi sanksi administratif teguran tertulis terhadap PT. Dempo Maju Cemerlang yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/11/P2KLPHL/DLH-2021 tanggal 24 Januari 2022. Hasil dari pengawasan ini, PT. Dempo Maju Cemerlang sudah memenuhi beberapa substansi kewajiban yang di muat dalam sanksi.		Tidak Taat
12	21 Juni 2022	PT. Transco Energi Utama	Kampung Rimbo Panjang, Nagari Tigo Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal	Sudah memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL. Terdapat beberapa kewajiban yang Pengelolaan Lingkungan yang belum dipenuhi.	Sudah menyerahkan laporan UKL-UPL semester 1 Tahun 2022, sudah melakukan pemantauan kualitas air limbah, air sungai dan udara. Sudah membuat logbook LB3.	Tidak Taat

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/Kota sebagai berikut :

Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2022

No	Pengadu	Tanggal Pengaduan	Pokok Pengaduan	Media yang tercemar	Hasil Tindak Lanjut	Status Pengaduan
1	Didi Someldi Putra, S.AP (Ketua Umum LSM Peduli Transparansi Reformasi - PETA)	26 Juli 2022	Dugaan pencemaran paritan dan lahan masyarakat di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang bersumber dari air limbah PT. Kemilau	Paritan dan lahan masyarakat	a. Sudah dilakukan verifikasi lapangan dan ditemukan beberapa pelanggaran b. Temuan hasil verifikasi sudah ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan	Selesai ditindaklanjuti

			Permata Sawit		Pertanahan tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. Kemilau Permata Sawit c. Kewajiban dalam Sanksi Administratif sudah dipenuhi dan dicabut dengan SK Kepala Dinas	
2	Muhammad Faisal	19 September 2022	Dugaan kegiatan penimbunan dan pembuatan pondasi tanah di atas sungai/muara Pantai Ketaping dengan tujuan memperluas lahan milik perseorangan atas nama Riko	Sungai/Muara Pantai Ketaping	Dilakukan verifikasi lapangan bersama tim dari OPD terkait yaitu Dinas PUTR dan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan	Selesai ditindaklanjuti
3	Wali Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Bayang Utara	9 Mei 2022	Dugaan terjadinya pencemaran yang menyebabkan kekeruhan air di Sungai Batang Bayang yang berhulu di Kabupaten Solok, dimana disepanjang aliran batang bayang yang berada di wilayah administrasi Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tidak ada kegiatan Industri ataupun pertambangan.	Sungai Batang Bayang	a. Dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 11 Mei 2022 oleh Dinas PerkimtanLH dan UPTD Laboratorium Lingkungan. b. Dilakukan pengambilan sampel air sungai di tiga titik yaitu sungai Batang Bayang, Bayang Nyalo dan Bayang Abu	Hasil verifikasi lapangan dan hasil uji sampel air sungai sudah diteruskan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Kepala Dinas PerkimtanLH Nomor 660/156/PERK IMTANLH-PS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022
4	Hendri Syah Putra	3 Februari 2022	Pencemaran udara berupa bau dan banyaknya lalat yang mengganggu masyarakat	Lingkungan masyarakat Nagari Muaro Gadang Timur Air	Telah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 7 Februari 2022 dan sudah dilakukan mediasi dengan masyarakat dan	Selesai ditindaklanjuti

			akibat adanya usaha ternak ayam potong di Nagari Muaro Gadang Timur Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti	pemilik ternak ayam potong agar melakukan pembenahan kandang sehingga tidak berdampak kepada masyarakat	
5	Arman Nuri	18 Maret 2022	Dugaan pencemaran udara debu yang berterbangan akibat aktifitas bongkar muat batu bata oleh Toko Bangunan Satria dan mengganggu kedai disebelahnya yang meruapakan milik pengadu di Jl. Pagaruyung Painan Kec. IV Jurai	Pencemaran udara di lokasi Jl. Pagaruyung Painan Kecamatan IV Jurai	Sudah dilakukan verifikasi lapangan dan mediasi dengan pihak pengadu dan Toko Bangunan Satria, dan Toko Bangunan Satria bersedia mengurangi volume batu bata di lokasi dan agar pihak toko bangunan untuk meletakkan segala jenis material di dalam lokasi IUP	Selesai ditindalanjuti
6	Didi Someldi Putra, S.AP (Ketua Umum LSM Peduli Transparansi Reformasi – PETA)	28 Juli 2022	Dugaan Pencemaran air dan tanah akibat tumpahan BBM akibat truk Pertamina (PT. Elnusa Petrofin) yang terguling di Jalan Lintas Sumatera Padang-Bengkulu, ruas Bukit Pulai Kecamatan Sutera tanggal 14 Mei 2022	Pencemaran air anak sungai Batang Jalamu di Bukit Pulai Kecamatan Sutera	1. Sudah dilakukan verifikasi lapangan dan dilakukan pengambilan sampel air anak sungai Batang Jalamu disekitar lokasi bekas tumpahan BBM. 2. Pihak PT. Elnusa Petrofin sudah memberikan ganti rugi ke pemilik lahan. 3. Hasil uji kualitas air sungai tidak ditemukan adanya parameter yang melebihi baku mutu.	Selesai ditindaklanjuti
7	Didi Someldi Putra, S.AP		Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk Uji Tanah pada lahan yang terkena tumpahan BBM	Pencemaran tanah lahan masyarakat di Bukit Pulai Kecamatan Sutera	1. Sudah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 10 November 2022 bersama Tim PerkimtanLH Kab. Pessel, Tenaga Ahli Tanah dan Tim DLHProv.	Masih dalam proses (Mediasi dengan Pihak Pengadu dan PT. Elnusa Petrofin belum dilaksanakan)

			PT. Pertamina di Bukit Pulai Kecamatan Sutera		<p>Sambar</p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan uji tanah di lokasi tumpahan BBM Ditemukan minyak lemak dalam konsentrasi yang rendah yang tidak berpengaruh signifikan pada tanaman di lokasi tumpahan. Kondisi lahan masyarakat sudah kembali seperti semula dimana ditumbuhi tanaman semak belukar yang tidak bernilai ekonomis dan dapat dijadikan sebagai acuan ganti kerugian. 	
8	Didi Someldi Putra, S.AP		Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk Uji Tanah pada parit dan lahan di PT. Kemilau Permata Sawit	Pencemaran Tanah di PT. Kemilau Permata Sawit	<ol style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 11 November 2022 bersama Tim PerkimtanLH Kab. Pessel, Tenaga Ahli Tanah dan Tim DLH Prov. Sumbar Hasil uji tanah pada lokasi yang diadakan menunjukkan (ray 5 dan ray 6) kadar minyak lemak. 	Masih dalam proses tindak lanjut
9	Jumadil (Masyarakat)	12 Oktober 2022	Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pabrik Kelapa Sawit PT. Transco Energi Utama Nagari Tigo Sungai Kecamatan Inderapura Kab. Pesisir	Pencemaran sungai Batang Panamban, Kecamatan Inderapura	<ol style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan verifikasi lapangan bersama tim DLH Sumbar dan Tim PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan tanggal 18 Oktober 2022. Dilakukan pertemuan dengan pihak pengadu dan perusahaan untuk mendapat informasi mengenai pokok pengaduan 	Masih dalam proses tindak lanjut

			Selatan		<ol style="list-style-type: none"> 3. Dilakukan pengambilan sampel air sungai dan air limbah 4. Ditemukan beberapa parameter yang melebihi baku mutu 	
10	Salparudin (Wali Nagari Pulau Rajo) melalui Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Bapak Bakri Bakar	10 Juni 2022	Tumpukan solid pabrik PT. Incasi Raya Sodetan POM yang dijadikan pupuk pada kebun sawit sehingga pada waktu cuaca hujan, air limpasan bekas solid tersebut masuk ke drainase primer kebun kemudian mengalir dibuang ke laut di Pantai Air Uba Nagari Pulau Rajo Muaro Sakai Kecamatan Air Pura	Pencemaran laut pada pantai Air Uba Nagari Pulau Rajo Muaro Sakai Kec. Air Pura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan verifikasi lapangan bersama tim DLH Prov. Sumbar dan Dinas PerkimtanLH Kab. Pesisir Selatan tanggal 29 Juni Tahun 2022 2. Pada saat verifikasi lapangan kondisi pantai Air Uba terdapat parkir kapal nelayan, beberapa penjual ikan menunggu kapal nelayan merapat membawa ikan hasil jaring dan air laut terlihat normal. 3. Pengambilan sampel air oleh UPTD LabaratoriumLingku nganHidup DLH Provinsi Sumatera baratdilakukan sebanyak3titik dan hasil uji kualitas air menunjukkan beberapa parameter pada Outlet IPAL melebihi baku mutu 	Masih dalam proses tindak lanjut
11	Pengaduan Masyarakat Tambang melalui Bupati Kabupaten Pesisir Selatan	Oktober 2022	Dugaan rusaknya bendungan yang mengairi sawah masyarakat seluas ± 80 Ha akibat kegiatan pertambangan batuan PT. Putra Salido	Bendungan irigasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan verifikasi lapangan bersama tim dari Kabupaten PesisirSelatan (Dinas PerkimtanLH, Dinas PUTR, DPMPSTP dan BPKAD) ke lokasi IUP PT. Putra Salido dan ditemukan adanya kerusakan bendungan di 	Selesai ditindaklanjuti

					<p>lokasi tsb.</p> <p>2. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/4664/PERKI MTANLH-PS/2022 tentang Peninjauan Ulang IUP CV. Putra Salido ke Gubernur Sumatera Barat C.q. Kepala Dinas PMPTSP Prov. Sumatera Barat</p> <p>3. Dilakukan verifikasi lapangan bersama tim dari Provinsi Sumatera Barat (DPMPTSP, ESDM,DLH,Satpol PP, Biro Hukum, Inspektur Tambang, Biro Perekonomian) dan tim dari Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 8 November 2022</p> <p>4. Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Nomor 540/1431/MB/D ESDM-2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Tindak Lanjut Peninjauan Lapangan Kegiatan Pertambangan Batuan CV.Putra Salido</p>	
--	--	--	--	--	---	--



Kunjungan Lokasi Tindak lanjut Pengaduan



Rapat Koordinasi Tindak lanjut Pengaduan

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dilakukan pembinaan ke sekolah sekolah dengan program Adiwiyata. Pada tahun 2022 sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten yaitu SMP Negeri 8 Koto XI Tarusan, SD Negeri 22 Palangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir, SMA Negeri 1 Pancung Soal. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional yaitu UPT SMPN 3 Ranah Pesisir dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri diraih oleh SMAN 3 Painan.



Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2022 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterima oleh Bupati pesisir Selatan



Piagam Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Program yang mendukung sasaran 3 yaitu Penyelesaian Sengketa tanah Garapan, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Penetapan tanah Ulayat, Pengelolaan Tanah Kosong, Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Penatagunaan Tanah.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Luas Lahan Bersertifikat} &= \frac{\text{Jumlah Luas lahan yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Luas Wilayah}} \times 100 \% \\ &= (2.682,196/4.036.246) \times 100\% \\ &= \mathbf{66.45274\%} \end{aligned}$$

No	Indikator Kinerja	Capaian		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		Target	Realisasi				
1	Persentase Luas Lahan Yang yang Bersertifikat Formula : <i>Jumlah Luas lahan yang Bersertifikat/ Jumlah Luas Wilayah</i>	68,554%	66.4527%	Program Penyelesaian Sengketa tanah garapan	61,559,080	51,153,730	83.10
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan tanah Untuk Pembangunan	41,997,990	40,908,190	97.41
				Program Redistribusian Tanah, Serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan maksimum dan tanah Absentee	45,667,464	43,984,364	96.31
				Program Penetapan tanah Ulayat	53,159,000	47,882,000	90.07
				Program Pengelolaan tanah Kosong	56,236,530	52,733,630	93.77
				Program Pengelolaan Izin Membuka tanah	1,585,100	1,585,100	100.00
				Program Penatagunaan Tanah	89,787,990	87,092,940	97.00
				JUMLAH			

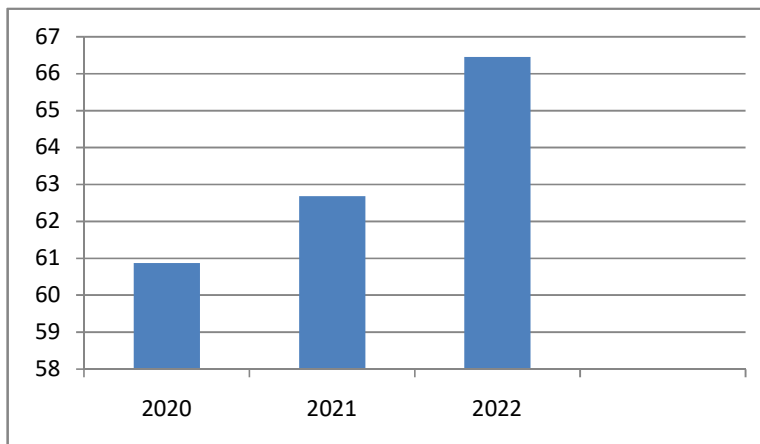
Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis bahwa capaian kinerja belum tercapai maksimal target dengan tingkat capaian 94.48 %. Dari sisi capaian Anggaran dari alokasi anggaran Rp. 349.993.154, terealisasi Rp. 325.339.954 dengan tingkat capaian 92.96 Dapat disimpulkan untuk target kinerja Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2022 terdapat efisiensi Anggaran sebesar Rp. 24.653.200

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Meningkatnya Tata kelola Pertanahan	1.1 Persentase Luas lahan Yang Bersertifikat	%	68.554	66.4527	96.934	

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1.1 Persentase Luas lahan Yang Bersertifikat	tanpa satuan	60.873	62.6855	66.4527

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Persentase Luas Lahan Bersertifikat mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari grafik dibawah ini dapat juga kita lihtan peningkatan capaian Kinerja Porsentase Luas Lahan Bersertifikat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022.



Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni

Untuk mendukung sasaran strategis 1 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Rasio Permukiman Layak Huni) mendukung Misi 6 dengan sasaran strategis terwujudnya keluarga bahagia yang indikator kerjanya adalah Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022			
				Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Terwujudnya keluarga bahagia	1.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	90.6663	91.7179	101.1599	

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	OPD
Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.882.238.890	7.342.879.231	93.16	Dinas Perkimtan LH

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 s.d 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
		2020	2021	2022
1.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	99.828	90.5339	91.7179

Analisis hasil capaian kinerja untuk 3 tahun terakhir indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan Capaian pada Tahun 2023 karena ada pendataan ulang Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun 2020. Pada Akhir Tahun 2020 memakai data TNP2K Tahun 2016 dimana Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 6.387 Unit yang berarti bahwa pada tahun 2020 berdasarkan hasil capaian kinerja 99.828 % sudah mendekati 100 % (hampir tuntas). Pada Tahun 2021 kita memakai data baru berdasarkan hasil validasi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perumahan provinsi Sumatera

Barat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah RTLH 11.345 Unit.

Capakupan ketersediaan Rumah Layak Huni diformulasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni} &= \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100 \% \\ &= (105.726/115273) \times 100 \% \\ &= 91.7179 \% \end{aligned}$$

NO	LOKASI	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2021	PENANGANAN 2022	JUMLAH RTLH 2022	JUMLAH RLH 2022	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTO XI TARUSAN	14,685	713	27	686	13,999	
2	BAYANG	1,515	212	124	88	1,427	
3	BAYANG UTARA	9,662	710	16	694	8,968	
4	IV JURAI	7,206	815	405	410	6,796	
5	BATANG KAPAS	11,771	445	80	365	11,406	
6	SUTERA	13,433	792	121	671	12,762	
7	LENGAYANG	16,241	1,072	141	931	15,310	
8	RANAH PESISIR	10,307	789	23	766	9,541	
9	LINGGO SARI BAGANTI	7,857	1,043	121	922	6,935	
10	AIR PURA	3,253	809	27	782	2,471	
11	PANCUNG SOAL	5,235	849	50	799	4,436	
12	BASA IV BALAI TAPAN	2,485	666	47	619	1,866	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,182	403	78	325	2,857	
14	LUNANG	5,058	946	22	924	4,134	
15	SILAUT	3,383	567	2	565	2,818	
	JUMLAH	115,273	10,831	1,284	9,547	105,726	

Sumber Data : Hasil Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan kabupaten Kota Lain Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bisa dilihat pada atabel berikut :

No	Kabupaten/Kota	Capainan Kinerja		
		2020	2021	2022
1	Kota Padang	95.75	95.596	96.74
2	Kabupaten 50 Kota	30.38	32.44	33.52

Jika dibandingkan dengan Kota Padang dengan jumlah RTLH 8.400 Unit, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Tahun 2020 Kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi kemudian terjadi penurunan tahun 2021 disebabkan validasi ulang data RTLH.

Dibandingkan Kabupaten 50 Kota dengan jumlah RTLH 16.991, Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Pesisir Selatan jauh lebih tinggi capaiannya dari Tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan jumlah RTLH Tahun 2022 adalah 9.547 Unit.

Faktor Keberhasilan Pencapaian Cakupan Ketersediaan rumah layak huni disebabkan karena Adanya Usaha dari Dinas Perkimtan LH untuk mengajukan alokasi anggaran penanganan Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan bantuan jumlah rumah yang diusulkan sebanyak 1.000 Unit dan terealisasi sebanyak 986 Unit. Badan Amil Zakat juga berkolaborasi dalam hal penanganan Rumah Tidak Layak Huni dengan penanganan RTLH Tahun 2022 sebanyak 117 Unit. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2022 penaganan RTLH sebanyak 181 unit

No	Indikator Kinerja	Capaian		Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
		Target	Realisasi				
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Formula : <i>(Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Rumah)*100 %</i>	90.6663	91.7179	Program Pengembangan Perumahan	535.179.470	213.778.081	39,95
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.108.299.000	5.104.353.080	99,92
				Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2.238.760.420	2.024.748.070	90,44
Jumlah					7.882.238.890	7.342.879.231	93,16

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisa bahwa tuk capaian keuangan untuk mencapai target kinerja Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni terealisasi 93.16 % yang berarti bahwa terjadi efeiensi anggaran sebesar Rp. 539.359.659



Rumah Tidak Layak Huni (Sebelum di rehabilitasi)



Rumah Layak Huni (Setelah di rehabilitasi)

3.4 Akuntabilitas Keuangan

No	Sasaran	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kawasan Permukiman Layak huni	96,8363	199,999,815	190,954,665	95.48
2	Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan	68.8	2,288,776,934	2,208,805,260	96.51
	IKA	55.3	1,819,682,552	1,799,130,760	98.87
	IKU	84.3	14,299,970	14,158,070	99.01
	IKL	63.4	149,921,940	140,473,146	93.70
			128,888,490	90,340,790	70.09
			37,614,930	34,776,760	92.45
			7,798,838,536	7,731,609,996	99.14
3	Meningkatnya Tata Kelola pertanahan	68,554%	61,559,080	51,153,730	83.10
			41,997,990	40,908,190	97.41
			45,667,464	43,984,364	96.31
			53,159,000	47,882,000	90.07

No	Sasaran	Target Tahun 2022	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	90.6663	89,787,990	87,092,940	97.00
			535,179,470	213,778,081	39.95
			5,108,299,000	5,104,353,080	99.92
			2,238,760,420	2,024,748,070	90.44

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tahun 2022, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan, yang nilai tertinggi 113.284 yaitu sasaran “Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan”. Sedangkan nilai terendah 96.934 % yaitu sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan”.

b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (Empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, Tiga indikator kinerja berhasil mencapai target. Satu Indikator yang tidak mencapai target yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah **102.865 %** dengan nilai tertinggi 113.284 yaitu sasaran “Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan”. Sedangkan nilai terendah 96.934 % yaitu sasaran “Meningkatnya Tata Kelola pertanahan”.

c. Capaian Indikator Keuangan

Untuk mencapai target masing masing Sasaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan :

1. Sasaran Meningkatkan Kawasan Permukiman Layak Huni anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 199.999.815,- terealisasi Rp190.954.665 (95,48%),
2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Media Lingkungan anggaran yang

dibutuhkan Rp. 12,388,023,352,- terealisasi Rp. 12,113,866,822 (97,79%).,

3. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola pertanahan dikabupaten Pesisir Selatan anggaran yang dibutuhkan Rp. 349,993,154,- teralisasi Rp. 325,339,954 (92,96 %),
4. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni anggaran yang dibutuhkan 7.882.238.890,- terealisasi sebesar Rp. 7.342.879.231 (93.16%)

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Mengharapkan dukungan dari berbagai pihak (terutama Tim TAPD) untuk memberikan anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh di Pesisir Selatan agar Kabupaten. Pesisir Selatan bebas dari kawasan kumuh;
3. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk

mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;

5. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;

Painan, 16 Februari 2023

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pahlawan Rawang Painan, Kode Pos 25611 eMail:disperkimtan@pesisirselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUKHRIDAL, S.H.**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Jabatan : **Bupati Pesisir Selatan**

Selaku **Atasan PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, Januari 2022

PIHAK KEDUA,

BUPATI PESISIR SELATAN

The image shows a blue circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp contains the text 'BUPATI PESISIR SELATAN' around the perimeter and a central emblem. A blue ink signature is written over the stamp.

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

The image shows a blue circular official stamp of the Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN' around the perimeter, 'DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP' in the center, and a signature. Below the stamp, the name 'MUKHRIDAL, S.H.' and the NIP. number '196003119091001' are printed.

MUKHRIDAL, S.H.
NIP. 196003119091001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kawasan permukiman Layak Huni	Rasio Permukiman Layak Huni	96.8363
2	Meningkatnya Kualitas Media Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.8
		IKA, IKU, IKL	IKA (55.3), IKU (84.3), IKL (63.4)
3	Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat	68.554%
		Inovasi Perkimtan LH (SIMANTAN)	1
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perkimtan LH	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan LH	BB

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Rp 6.979.321.973	APBD
2	Program Pengembangan Perumahan	Rp 667.995.970	APBD
3	Program Kawasan Permukiman	Rp 199.999.815	APBD
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 5.274.999.000	APBD
5	Program Peningkatan Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)	Rp 2.464.999.920	APBD
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 42.999.980	APBD
7	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp 34.999.990	APBD
8	Program Redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Rp 59.999.864	APBD
9	Program Penetapan Tanah Ulayat	Rp 40.000.000	APBD
10	Program pengelolaan tanah kosong	Rp 61.999.790	APBD
11	Program Pengelolaan izin membuka tanah	Rp 30.000.000	APBD
12	Program Penatagunaan tanah	Rp 79.999.990	APBD
13	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 2.308.766.738	APBD
14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 1.729.201.270	APBD
15	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 14.299.970	APBD
16	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 102.986.620	APBD
17	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 114.866.490	APBD
18	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 30.739.950	APBD
19	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 7.633.369.940	APBD
	TOTAL	Rp 27.871.547.270	


 Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Januari 2022
 Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
 Pertanahan dan Lingkungan Hidup


 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 PESIR SELATAN
 NIP. 19640128 199309 1001